



**PENGARUH INFLASI DAN PDRB TERHADAP
PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1993-2009**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh
Dania Safia Safitri
NIM 7450406051

PERPUSTAKAAN
UNNES

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. P. Eko Prasetyo, SE. M.Si

Amin Pujiati, SE. M.Si

NIP. 196801022002121003

NIP.196908212006042001

Mengesahkan

PERPUSTAKAAN
UNNES

DR. Hj. Suchatiningsih DWP, M.Si

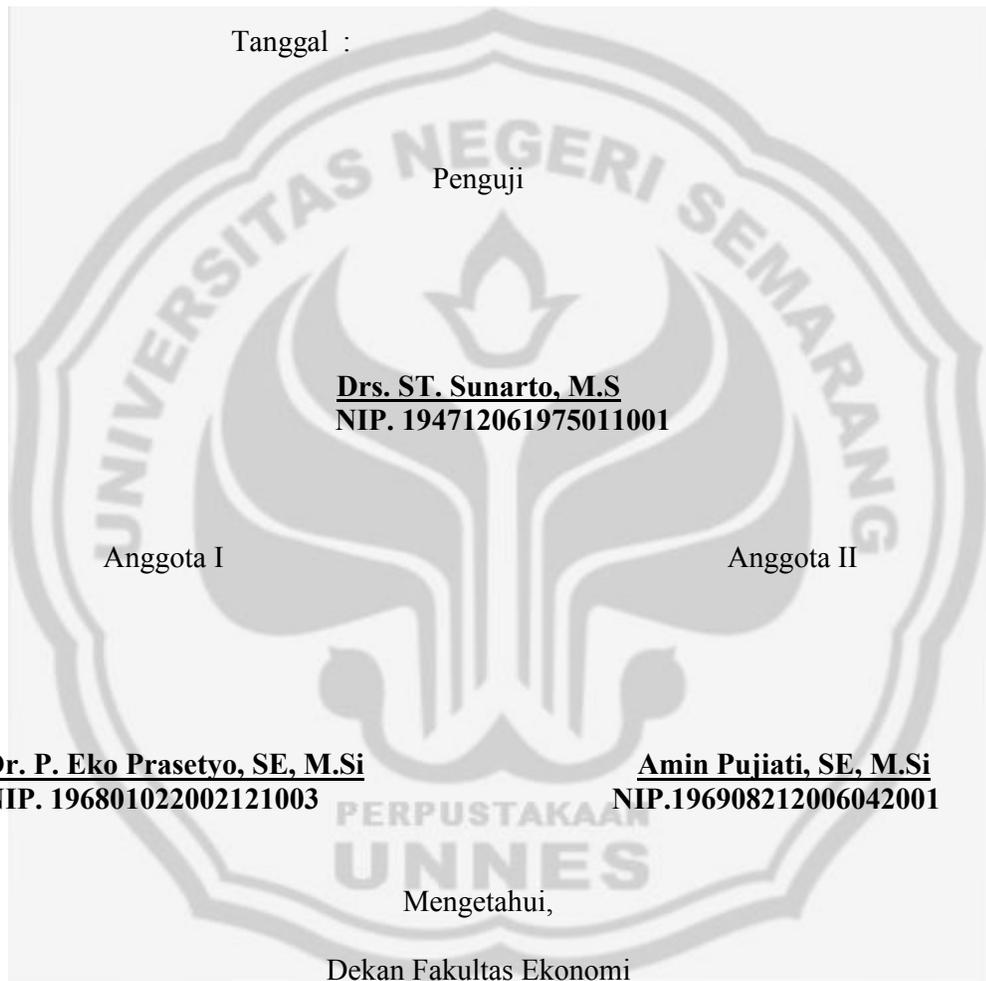
NIP. 19681209199702201

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :



Drs. S. Martono, M.Si
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Maret 2011

Dania Safia Safitri
NIM 7450406051

PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ✚ ”Cukuplah bagi kami Allah, menjadi Tuhan kami dan Dialah sebaik-baik wakil (yang membereskan semua urusan)” (Ali’Imran: 173) ”Dialah sebaik-baik pemimpin dan penolong” (Al-Anfal: 40)
- ✚ ”Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” (Khalifah Umar R.A)
- ✚ ”Jangan Pernah Menyerah dan Putus asa, jika ada kemauan Allah SWT selalu memberi kemudahan dan pertolongan pada kita” (Penulis)

Persembahan

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do’a, semangat dan dukungannya
2. Kakak dan Adikku tersayang
3. Teman-teman seperjuangan IESP 2006
4. Teman-teman yang selalu ada dengan do’a dan semangatnya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas tersusunnya skripsi ini dengan judul “Pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009” ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akhir untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu disampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Drs. S. Martono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
3. DR. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang
4. Dr. P. Eko Prasetyo, SE. M.Si, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingannya
5. Amin Pujiati, SE. M.Si, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya selama ini
7. Teman- teman IESP 2006 dan sahabat- sahabatku, olif, pipit, Imam Fahrizal, Jayanto.

8. Ilham makasih atas doa dan semangatnya, karena kamu aku bisa lalui semua ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini lebih jauh dari sempurna oleh karena itu, jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini dapat diterima dengan senang hati.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang telah membantu.

Semarang, April 2011

Penulis



SARI

Safitri, Dania Safia. 2011. *“Pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009”*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. P. Eko Prasetyo. SE.,M.si. II. Amin Pujiati S.E.,M.si.

Kata Kunci : Inflasi, PDRB dan Pengangguran Terbuka

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengangguran terbuka di Jawa Tengah mengalami peningkatan, ini merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, dapat menjadi beban masalah keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong meningkatnya keresahan sosial dan kriminalitas serta dapat menghambat pembangunan. Apakah inflasi dan PDRB berpengaruh terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dan Seberapa besar pengaruh inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran terbuka di tahun 1993-2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah serta mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini di Jawa Tengah. Variabel yang diukur adalah inflasi dan PDRB sebagai variabel bebas dan Pengangguran Terbuka sebagai variabel Terikat. Tehnik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*)

Hasil penelitian menunjukkan variabel inflasi berpengaruh negatif dan tiak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah dengan nilai sig. 0.557 sedangkan PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan sebesar 0.04 terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Secara bersama-sama variabel infasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah, hal ini dapat diketahui dari uji F sebesar 2168 dengan nilai sig. 0.04.

Penelitian ini menjelaskan bahwa variabel inflasi dan PDRB mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengangguran terbuka di Jawa tengah, saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini diperlukan suatu kebijakan dengan lebih meningkatkan peran PDRB di berbagai sektor terutama sektor ekonomi yang bersifat padat karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil, diantaranya dengan mendorong kenaikan investasi melalui suasana yang kondusif dalam memberikan kemudahan prosedur kepada para investor serta meningkatkan sarana dan prasarana di wilayah Jawa Tengah. Inflasi yang dapat dikendalikan merupakan sebuah kesuksesan dalam perekonomian, tetapi juga harus diimbangi dengan kegiatan perekonomian yang lain seperti penurunan suku bunga, sehingga nantinya akan meningkatkan investasi dan juga memacu untuk meningkatkan ekspor. Peningkatan investasi juga bisa menambah lapangan pekerjaan yang ada sehingga pengangguran dapat berkurang. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya menetapkan ulang kebijakan pajaknya. Dengan pajak yang tinggi, maka daya beli masyarakat menjadi lemah dan akan memperlemah kemampuan masyarakat untuk belanja.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Tenaga Kerja.....	17
2.1.1 Pengertian Ketenagakerjaan.....	17
2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja.....	24
2.1.3 Penawaran Tenaga Kerja	25
2.1.4 Pengertian Pengangguran.....	25
2.2. Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen ...	29
2.2.1 Pengaruh tingkat inflasi terhadap pengangguran	29
2.2.2 Pengaruh PDRB terhadap pengangguran.....	34
2.3. Penelitian terdahulu.....	38
2.4. Kerangka Berfikir.....	39
2.5. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Jenis dan sumber penelitian	42

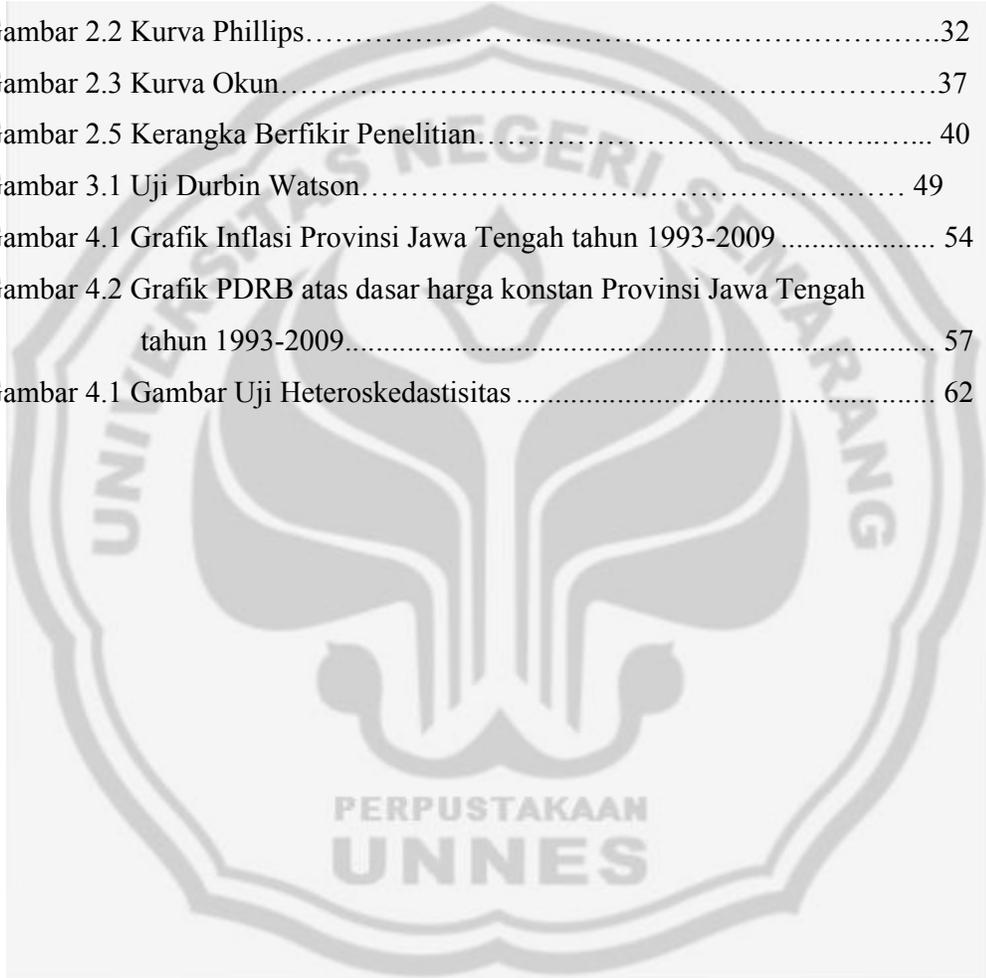
3.3 Definisi Operasional.....	43
3.4 Metode Pengumpulan data	43
3.5 Alat analisis data	44
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	44
3.5.2 Analisis Kuantitatif.....	44
3.5.3 Pengujian Hipotesis	45
3.5.3.1 Uji Statistik t.....	45
3.5.3.2 Uji Statistik F.....	46
3.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi.....	46
3.5.4 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.5.4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.5.4.2 Uji Multikoloniaritas	48
3.5.4.3 Uji Autokorelasi.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Objek Penelitian	50
4.2. Kondisi Pengangguran di Jawa Tengah	52
4.3. Gambaran Variabel Penelitian.....	53
4.4. Analisis Data Penelitian	57
4.4.1 Hasil Analisis Regresi.....	57
4.4.2 Pengujian Hipotesis	58
4.4.3 Uji Asumsi Klasik	60
4.5. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1993-2009.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993- 2009	6
Tabel 1.3 PDRB atas dasar harga konstan tahun 2001-2009	11
Tabel 1.5 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2009.....	12
Tabel 4.1 Jumlah Pengangguran dan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun1993-2009.....	58
Tabel 4.2 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009.....	59
Tabel 4.4 PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009.....	64
Tabel 4.5 Hasil Analisa Regresi Berganda	68
Tabel 4.6 Model Summary.....	69
Tabel 4.7 Uji Gletser.....	74
Tabel 4.8 Data yang akan di olah	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2009.....	6
Gambar 1.2 Grafik Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009.....	9
Gambar 2.1 Penduduk dan Tenaga Kerja.....	24
Gambar 2.2 Kurva Phillips.....	32
Gambar 2.3 Kurva Okun.....	37
Gambar 2.5 Kerangka Berfikir Penelitian.....	40
Gambar 3.1 Uji Durbin Watson.....	49
Gambar 4.1 Grafik Inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009.....	54
Gambar 4.2 Grafik PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009.....	57
Gambar 4.1 Gambar Uji Heteroskedastisitas.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Penelitian	75
Lampiran 2 Hasil Analisis Regresi	76



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 2000). Oleh karenanya, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan perkapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan berhasil jika beban sosial semakin berat, pengangguran semakin meningkat, distribusi pendapatan tidak merata dan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan juga semakin meningkat. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satu diantaranya dari tingkat pengangguran. Melalui tingkat pengangguran kita dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat distribusi pendapatan. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dijelaskan mengenai Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJM Nasional). Dalam pelaksanaan RPJM Nasional, dikenal adanya strategi pokok pembangunan yang salah satunya memuat mengenai strategi pembangunan Indonesia. Sasaran pokok dari strategi pembangunan Indonesia adalah untuk pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Hak-hak dasar yang dimaksudkan adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut dan kebebasan mengemukakan pendapatnya dan memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Hak-hak dasar tersebut selama ini telah terabaikan dan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan yang berjalan padahal hak-hak dasar tersebut secara jelas diamanatkan oleh konstitusi. Tanpa pemenuhan hak dasar akan sulit diharapkan partisipasi pada kebebasan dan persamaan.

Pada UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang baru-baru ini diperbincangkan yang menyinggung masalah buruh, dijelaskan mengenai pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk

menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Untuk itu diperlukan adanya agenda dalam melaksanakan rencana program pembangunan tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari adanya program ini antara lain : penciptaan lapangan kerja yang memadai untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas sumber daya alam serta perbaikan infrastruktur.

Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang diperoleh dari BPS pada tahun 2009 tumbuh sebesar 4.71%. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak terlepas dari usaha keras secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Potensi wilayah dan kekayaan alam dapat dilihat sebagai keunggulan komparatif bagi daerah, namun di sisi lain berbagai kendala seperti sumber daya manusia dan sumber modal untuk memanfaatkan potensi tersebut masih dihadapi oleh penentu kebijakan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten/ kota. Akibatnya kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui

kekurangan, diantaranya adalah masalah pengangguran sebagai penghambat dalam pencapaian tingkat perekonomian.

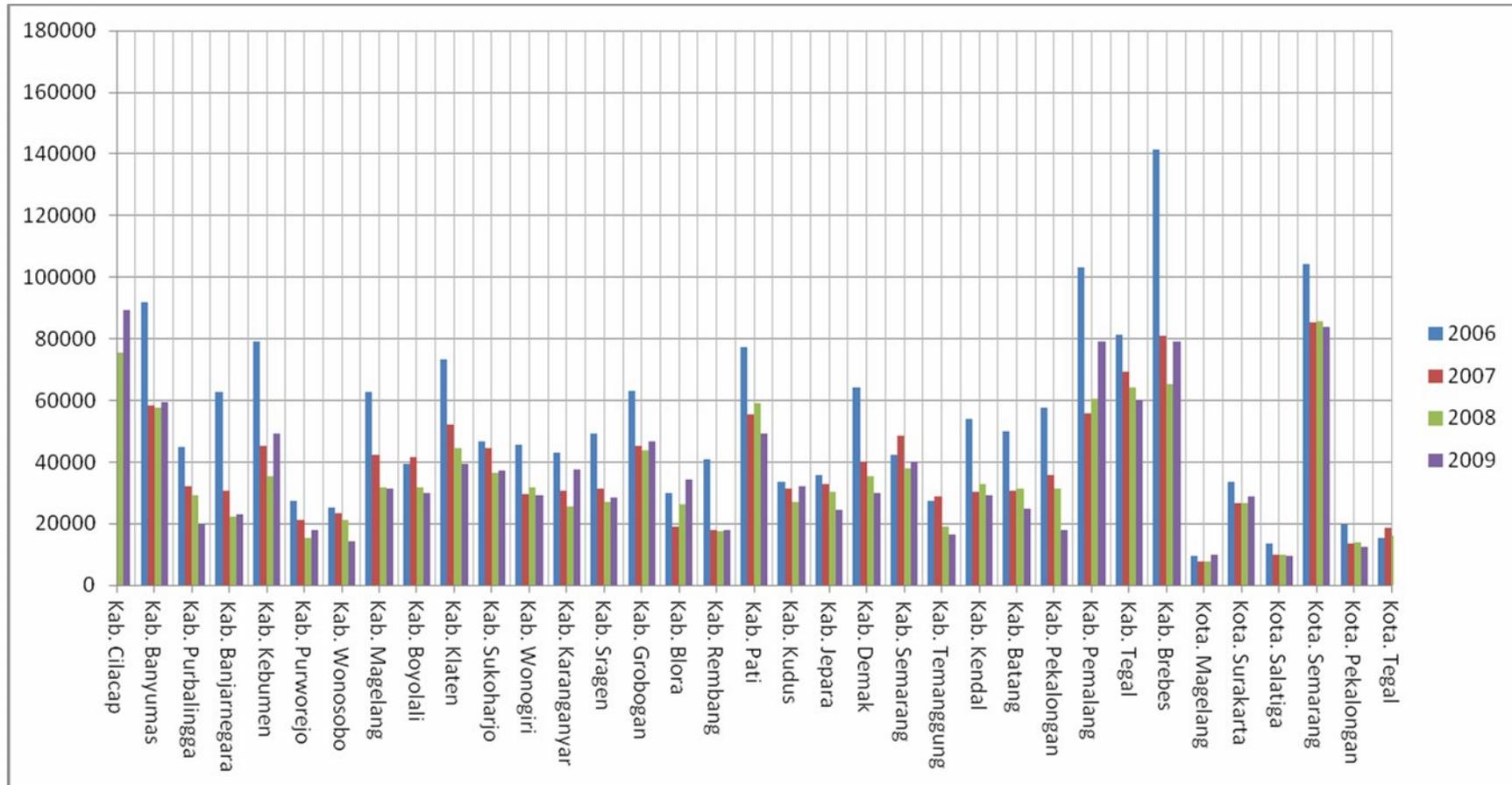
Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, dapat menjadi beban masalah keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong meningkatnya keresahan sosial dan kriminalitas serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004). Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja. Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja tersebut akan berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik secara spasial antara desa-kota maupun secara sektoral. Hal ini sejalan dengan pernyataan Todaro (2000) yang menjelaskan bahwa terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah atau pendapatan yang besar antara desa atau kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan dikota.

Tabel 1.1
Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2009

NO	KABUPATEN / KOTA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	40930	63263	62871	74111	144991	154593	93016	75495	89175
2	Kab. Banyumas	27756	38962	37560	34740	82835	91815	58273	57620	59582
3	Kab. Purbalingga	14543	18564	14796	19202	40449	44853	32008	29058	19638
4	Kab. Banjarnegara	12712	23986	19471	29671	45286	62657	30563	22464	22993
5	Kab. Kebumen	14562	34151	27848	29576	76302	79265	45193	35304	49241
6	Kab. Purworejo	5998	10163	6382	10494	23842	27501	21257	15364	17748
7	Kab. Wonosobo	4018	10989	6767	12602	24605	25162	23258	21290	14292
8	Kab. Magelang	19275	25921	32681	38396	58491	62856	42462	31602	31253
9	Kab. Boyolali	9879	18750	20458	30980	43336	39568	41517	31656	29899
10	Kab. Klaten	19285	31331	33577	43768	50682	73355	52113	44454	39271
11	Kab. Sukoharjo	14042	22622	29723	40221	47256	46631	44532	36379	37359
12	Kab. Wonogiri	10404	20123	21605	28629	55558	45600	29563	31945	29159
13	Kab. Karanganyar	9787	20306	20191	23144	31816	43159	30840	25700	37608
14	Kab. Sragen	12670	29284	21972	19874	53692	49236	31318	26870	28624
15	Kab. Grobogan	19196	38359	37085	33682	48613	63179	45080	43657	46610
16	Kab. Blora	5937	8636	10400	16171	21001	29839	19185	26166	34361
17	Kab. Rembang	6647	9016	8479	14664	28460	40823	17844	17571	18058
18	Kab. Pati	18882	34096	32290	28342	48986	77402	55607	59012	49094
19	Kab. Kudus	16353	24606	17087	29388	33093	33524	31246	27205	32306
20	Kab. Jepara	15296	17287	20312	21960	46024	35664	33031	30426	24562
21	Kab. Demak	28162	30096	31979	46974	50633	64220	40154	35569	30022
22	Kab. Semarang	11380	23043	24881	23012	32404	42487	48661	37842	40267
23	Kab. Temanggung	3857	12909	12926	14673	25197	27473	28732	18941	16514
24	Kab. Kendal	15200	22669	23472	33219	34305	53814	30327	32929	29255
25	Kab. Batang	21781	29002	27060	31347	43776	50040	30843	31574	24733
26	Kab. Pekalongan	12752	28586	26248	22490	35999	57666	35802	31380	17993
27	Kab. Pemalang	31356	61987	45035	45733	67705	103239	55792	60483	79116
28	Kab. Tegal	28904	55423	59467	50026	82140	81460	69196	64281	60152
29	Kab. Brebes	41372	71781	71476	57660	118340	141320	81094	65357	79116
30	Kota. Magelang	3900	5539	7183	5358	11774	9548	7855	7639	9863
31	Kota. Surakarta	17679	25830	18318	19855	27848	33726	26770	26574	28778
32	Kota. Salatiga	8228	8096	7746	10917	12980	13636	9833	9816	9674
33	Kota. Semarang	40738	82503	51583	79270	87520	104301	85249	85710	83963
34	Kota. Pekalongan	6572	16393	11980	14223	23863	19568	13399	13818	12564
35	Kota. Tegal	8137	9962	11604	10201	18178	15515	18606	16157	19168
total		578190	984234	912513	1044573	978 952	1944695	1360219	1227308	1252267

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Grafik 1.1 Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2009



UNNES

Sumber: BPS dalam Angka, 2006-2009



Berdasarkan grafik 1.1 diatas dapat dilihat secara umum bahwa pengangguran terbuka yang terjadi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2001-2009 menunjukkan angka yang naik turun dari masing-masing Kabupaten/Kota. Pengangguran tertinggi berada di tahun 2007 yaitu berada di Kabupaten Cilacap dengan jumlah 93016 jiwa. Berdasarkan dari data diatas dapat dilihat bahwa kondisi pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 1993-2009 sebesar 5.48%.



Tabel 1.2

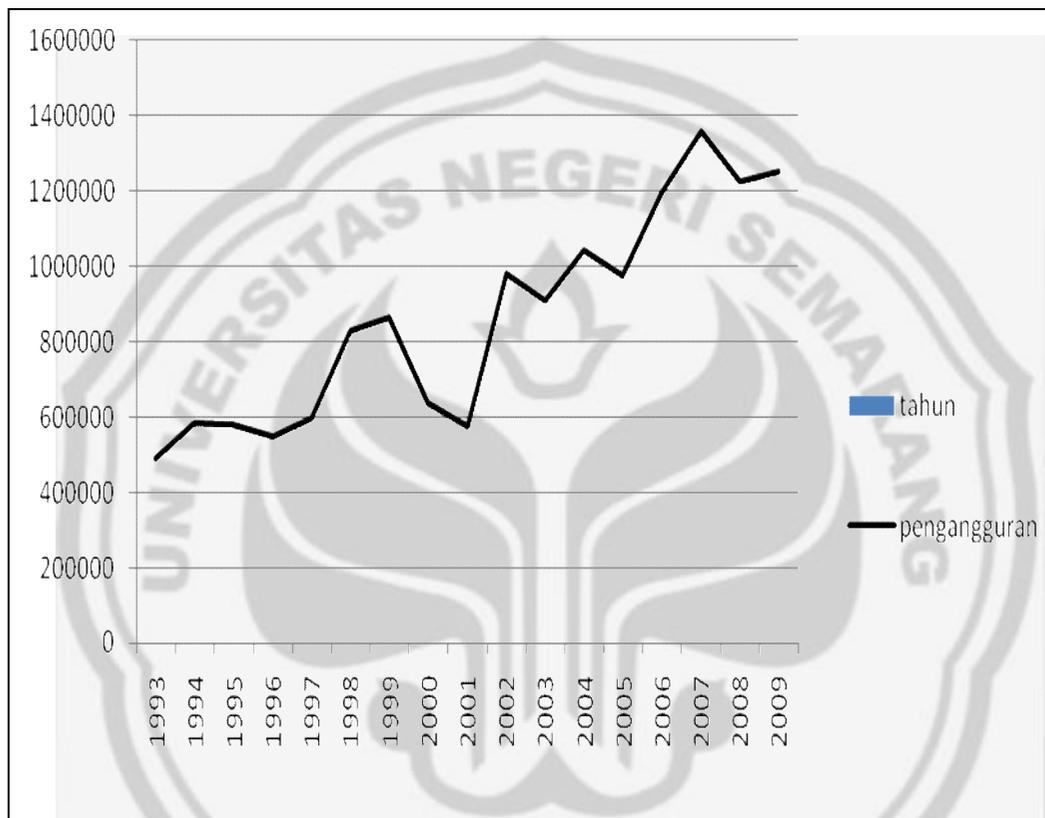
Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009

Tahun	Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran (%)
1993	493 330	3.44
1994	585 392	4.05
1995	580 548	3.97
1996	552 914	3.85
1997	599 237	4.16
1998	831 435	5.56
1999	867 226	5.61
2000	637 900	4.21
2001	578 190	3.70
2002	984 234	6.26
2003	912 513	6.19
2004	1 044 573	6.53
2005	978 952	5.88
2006	1 197 244	7.30
2007	1 360 219	7.70
2008	1 227 308	7.35
2009	1 252 267	7.33
Rata-rata tingkat pengangguran		5.48

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pengangguran terbuka di Jawa Tengah mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2002-2009 khususnya tahun 2004 hingga mencapai jumlah 1 044 573 jiwa kemudian menurun di tahun 2005 namun kembali naik di tahun 2007 - 2009 yang pada puncaknya terjadi di tahun 2007

mencapai 1 360 219 juta jiwa. Hal ini juga bisa dilihat dari rata-rata tingkat pengangguran yang dari tahun ke tahun terdapat kecenderungan naik yang cukup tajam antara tahun 2002 sampai tahun 2009 dengan rata-rata tingkat penganggurannya sebesar 5.48%. Kenaikan pengangguran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Grafik 1.2

Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran terbuka merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat

mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Di Jawa Tengah besarnya tingkat pengangguran terbuka bergerak secara naik turun, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 132.911 jiwa. Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara (dikutip dari Prasetyo, Tri Bambang, 2008) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Pada awal tahun 1970, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi sebab di banyak negara berkembang terdapat gejala adanya kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pengangguran yang cenderung meningkat walaupun pendapatan nasional mengalami peningkatan secara stabil. Permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan masih diprioritaskan pada masalah-masalah sosial yang mendasar antara lain besarnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 1.3

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2001-2009

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB
2001	25392529	3.59
2002	26584870	3.55
2003	26483217	4.98
2004	26627570	5.13
2005	27323479	5.35
2006	27041083	5.33
2007	26797815	5.59
2008	27121214	5.46
2009	24669525	4.71

Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional cukup besar namun terkadang tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, peran tersebut menjadi beban optimal. Fenomena perekonomian saat ini cenderung menuntut adanya peran aktif dari para eksekutif untuk lebih banyak menggali potensi perekonomian daerahnya serta memainkan peranan yang lebih besar dalam merangsang aktivitas ekonomi daerah.

Tabel 1.4
Tingkat Inflasi di Jawa Tengah Tahun 2000-2009
(dalam persen per tahun)

Tahun	Inflasi
2000	9.35
2001	12.55
2002	10.03
2003	5.06
2004	6.4
2005	17.11
2006	6.6
2007	6.59
2008	9.47
2009	3.62

Sumber: BPS Jawa Tengah dalam angka, diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa laju inflasi di Jawa Tengah periode 2000-2009 masih sangat fluktuatif. Pada tahun 2008 tingkat inflasi berada pada angka 9.47%. Hal ini disebabkan dari dampak krisis ekonomi tahun 1997, daerah-daerah pun mengalami krisis. Inflasi yang tinggi terutama adalah terjadinya masa paceklik bahan pangan akibat musim kemarau yang berkepanjangan yang disertai oleh peningkatan harga barang ekspor non minyak pada tahun 1998, meningkatnya pemasukan modal / pinjaman swasta dari luar negeri dan berlipat gandanya penerimaan minyak akibat peningkatan harga minyak pada pasaran dunia.

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan harga-harga (inflasi) maka permintaan tenaga kerja meningkat, dan pengangguran berkurang.

Pengangguran merupakan salah satu tolok ukur sosio ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya pengangguran. Pengangguran yang ada di Jawa Tengah hingga tahun 2009 menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong penganggur masih cukup tinggi yaitu mencapai 5.48 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Diharapkan faktor – faktor yang mempengaruhi pengangguran seperti inflasi dan produk domestik regional bruto (PDRB) dapat meminimalisir pengangguran yang terjadi di Jawa Tengah. Dari fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk mengamati lebih lanjut tentang “Pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana Inflasi dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah
2. Pengaruh PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah
3. Pengaruh Inflasi dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik bersifat akademis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian dilakukan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan bagi mahasiswa serta dapat memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam hal Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah khususnya.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperdalam wawasan pengetahuan penulis tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah jika dilihat secara Makro dan seberapa besar pengaruhnya.

c. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi pengambil kebijakan

Sebagai informasi bagi lembaga-lembaga terkait yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijaksananya.

b. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai pengangguran dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Tenaga Kerja

2.1.1 Pengertian Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengertian kedua dari sumber daya yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, artinya mampu melaksanakan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi masyarakat (Simanjuntak, Payaman, 2001:2)

Sumber daya manusia atau sering disebut dengan *human resources* merupakan penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi, hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (*man power*) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan yang sedang melakukan kegiatan lain seperti : bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, Payaman 2001:3). Menurut BPS, di Indonesia digunakan penetapan umur maksimal berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan.

Menurut (Simanjuntak, Payaman 2001:3), konsep dari tenaga kerja adalah terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya tergolong siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan termasuk di dalam golongan menganggur.

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja atau bisa dikatakan sebagai dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Kelompok bukan angkatan ini terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain yang menerima pendapatan.

Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) memberikan pengertian dan definisi terhadap konsep ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Penduduk

Penduduk adalah semua orang Indonesia yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

2. Umur

Umur seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan tahun kelahiran diketahui. Penghitungan umur menggunakan pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir. Umur dinyatakan dalam kalender masehi.

3. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

4. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Selain itu, juga termasuk angkatan kerja adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari dan orang yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja atau dengan kata lain menganggur.

5. Bekerja

Bekerja di definisikan sebagai kegiatan ekonomi dengan menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keberuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut

termasuk pula kegiatan pekerja tak di bayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

6. Sementara tidak bekerja

Sementara tidak bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, seperti:

- Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatan sementara (misalnya kerusakan mesin, dan lain-lain).
- Petani-petani yang mengusahakan gabah pertanian sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu masa panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.

7. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka meliputi:

- Penduduk yang sedang mencari pekerjaan.
- Penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha.
- Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan

8. Mencari pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode waktu.

9. Mempersiapkan usaha

Mempersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar.

10. Setengah penganggur

Setengah penganggur adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau kurang dari jam kerja normal.

11. Setengah penganggur terpaksa

Setengah penganggur terpaksa adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu dan masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara mencari pekerjaan dan atau mempersiapkan usaha.

12. Setengah penganggur sukarela

Setengah penganggur sukarela adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu dan tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

13. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja seperti :

- Sekolah, yaitu mereka yang kegiatannya dirumah.
- Mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
- Lainnya, yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental atau lainnya.

14. Pekerjaan purna waktu (Full Time)

Pekerjaan purna waktu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan sesuai dengan jam kerja yang berlaku ditempat bekerja dan biasanya merupakan pekerjaan utama.

15. Pekerjaan Paruh waktu (Part Time)

Pekerjaan paruh waktu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan pada sebagian waktu dari jam kerja normal yang berlaku di tempat kerja.

16. Lapangan usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja, meliputi:

- a. Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
- b. Pertambangan dan penggalian.
- c. Industri pengolahan.
- d. Listrik, gas dan air.
- e. Konstruksi.
- f. Perdagangan, rumah makan dan hotel.
- g. Angkutan, pergudangan dan komunikasi.
- h. Keuangan, asuransi dan usaha persewaan bangunan.
- i. Jasa-jasa kemasyarakatan, social dan perorangan lainnya.

17. Jenis pekerjaan

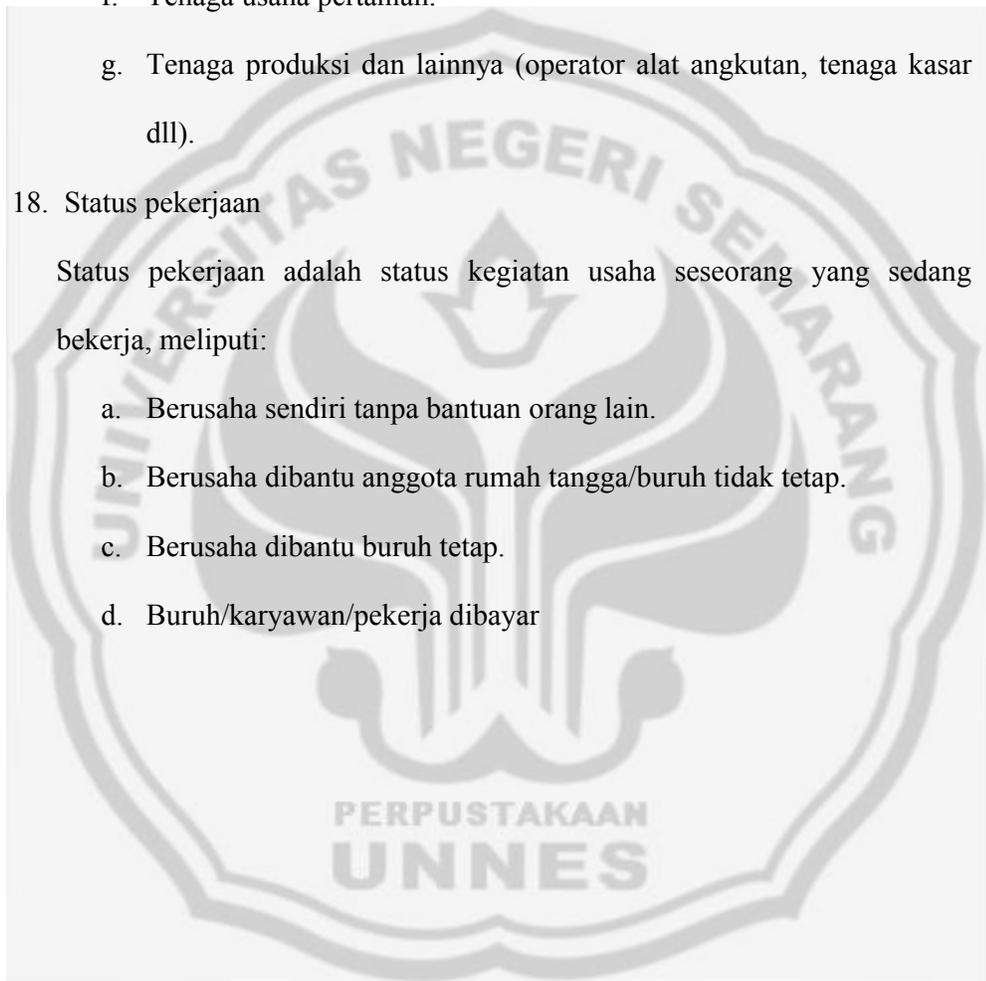
Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang yang bekerja yang di bagi dalam 8 golongan besar yaitu:

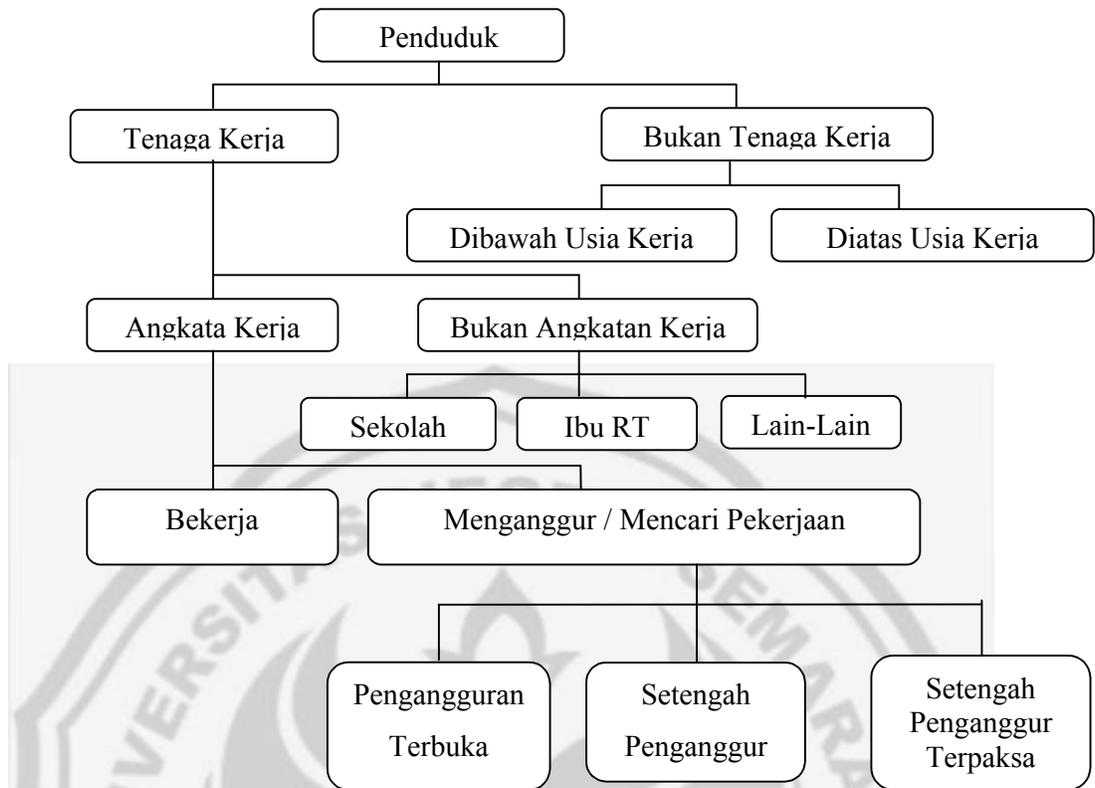
- a. Tenaga professional.
- b. Kepemimpinan dan ketatalaksanaan.
- c. Pejabat pelaksana dan tenaga tata usaha.
- d. Tenaga usaha penjualan.
- e. Tenaga usaha jasa.
- f. Tenaga usaha pertanian.
- g. Tenaga produksi dan lainnya (operator alat angkutan, tenaga kasar dll).

18. Status pekerjaan

Status pekerjaan adalah status kegiatan usaha seseorang yang sedang bekerja, meliputi:

- a. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain.
- b. Berusaha dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap.
- d. Buruh/karyawan/pekerja dibayar





Gambar 2.1 : Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja
Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam angka 2009

2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah jumlah suatu komoditi yang tersedia dibeli individu selama periode waktu tertentu yang besarnya di pengaruhi oleh harga komoditi, pendapatan nominal, harga komoditi lain dan cita rasa. Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan sebuah daftar sebagai alternatif kombinasi tenaga kerja dan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan tingkat upah.

Menurut Ade Heryani, 2009:3, permintaan akan tenaga kerja berasal dari pihak dunia usaha. Orang berusaha sendiri atau ada orang lain yang membutuhkan dan memperkerjakan. Ada akan permintaan tenaga kerja karena ada permintaan

akan barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu. Permintaan para produsen akan faktor produksi tenaga kerja tergantung dari permintaan masyarakat akan hasil produksi.

2.1.3 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran adalah jumlah komoditi yang tersedia ditawarkan oleh produsen selama periode waktu tertentu dan dipengaruhi oleh harga komoditi itu sendiri dan biaya yang dikeluarkan. Penawaran terhadap tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan tenaga kerja yang tersedia ditawarkan oleh supplier (Aris Ananta, 2001:27 dalam Aisyah, Dede).

Sebuah kurve penawaran tenaga kerja menggambarkan kombinasi terhadap kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan dengan kombinasi tingkat upah tertentu. Dengan kata lain, kurve penawaran tenaga kerja merupakan kombinasi dari berbagai kemungkinan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada berbagai tingkat upah yang ditawarkan pada berbagai tingkat upah tertentu yang berlaku.

2.1.4 Pengertian Pengangguran Terbuka

Menurut Sumarsono, Sony 2003:114 Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Triyanto. 1990:109, Pengangguran terbuka yaitu angkatan kerja yang belum bekerja karena belum mendapatkannya.

Menurut BPS, Pengangguran terbuka terdiri atas:

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan.
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha.

3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan

Menurut (Sumarsono, 2003:116) bentuk-bentuk pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Dimana kesulitan temporer ini dapat berupa berbentuk waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi atau terjadi karena faktor jarak dan kurangnya informasi. Selama proses demikian, seorang pelamar yang menunggu panggilan untuk seleksi atau ujian masuk (yang belum pasti akan diterima) adalah tergolong pengangguran friksional. Menurut Mankiw (2003), pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan para pencari kerja untuk mencocokkan antara kualifikasi yang dimiliki dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan tersebut dikatakan pengangguran friksional. Menurut Sukirno (2004) secara teori pengangguran sebesar 2-3 persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi sudah dipandang telah mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2-3 persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik dalam proses mencari kerja baru tersebut untuk sementara para pekerja tergolong sebagai

penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran Struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Dimana dengan perubahan struktur tersebut memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut. Bentuk penganggur struktur lain adalah terjadinya pengurangan pekerja akibat penggunaan alat-alat dan teknologi maju. Penganggur sebagai akibat perubahan struktur perekonomian pada dasarnya memerlukan tambahan latihan untuk memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan permintaan dan teknologi baru.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran Musiman terjadi karena pergantian musim. Diluar musim panen dan turun ke sawah, banyak orang yang mempunyai kegiatan ekonomis, mereka hanya sekedar menunggu musim musim yang baru. Selama masa menunggu tersebut mereka digolongkan sebagai penganggur musiman.

d. Pengangguran Terpaksa dan Pengangguran Sukarela Pada tingkat

keseimbangan yang diciptakan oleh pasar kompetitif perusahaan-perusahaan akan mau mempekerjakan semua pekerja yang memenuhi kualifikasi dan mau bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Pengangguran yang terjadi jika ada pekerjaan yang tersedia, tetapi orang yang menganggur

tidak bersedia menerima pada tingkat upah yang berlaku untuk pekerjaan tersebut disebut pengangguran sukarela.

Menurut BPS, terjadinya pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka

Adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

2. Setengah Pengangguran

Adalah seseorang yang selama periode tertentu bekerja kurang dari jam kerja normal. Dalam hal ini, jam kerja normal ditetapkan sebanyak 35 jam per minggu.

3. Setengah Pengangguran Terpaksa

Adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia menerima pekerjaan lain/tambahan.

Didalam penelitian ini pengangguran yang dipakai adalah pengangguran terbuka, karena tenaga kerja ini adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan setengah penganggur dan setengah penganggur terpaksa merupakan tenaga kerja yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi mereka masih dalam proses mencari.

2.2 Hubungan Antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen

2.2.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran

Menurut Boediono (1994 :155) definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan pada harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus menerus juga harus digaris- bawahhi. Kenaikan harga-harga karena misalnya, musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya yang sifatnya hanya sementara tidak disebut inflasi.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan dan desakan biaya produksi. Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment*. Inflasi desakan biaya produksi (*Cost Push Inflation*) terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal yaitu kenaikan harga misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

Penggolongan inflasi berdasarkan asalnya inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri

Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.

2. inflasi yang berasal dari luar negeri

Inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga inflasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Inflasi tertutup (*Closed Inflation*)

Inflasi tertutup terjadi karena adanya kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu.

2. Inflasi terbuka (*Open Inflation*).

Inflasi terbuka adalah apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum.

3. Inflasi yang tidak terkendali (*Hyperinflation*).

Hiperinflasi adalah serangan inflasi yang demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot.

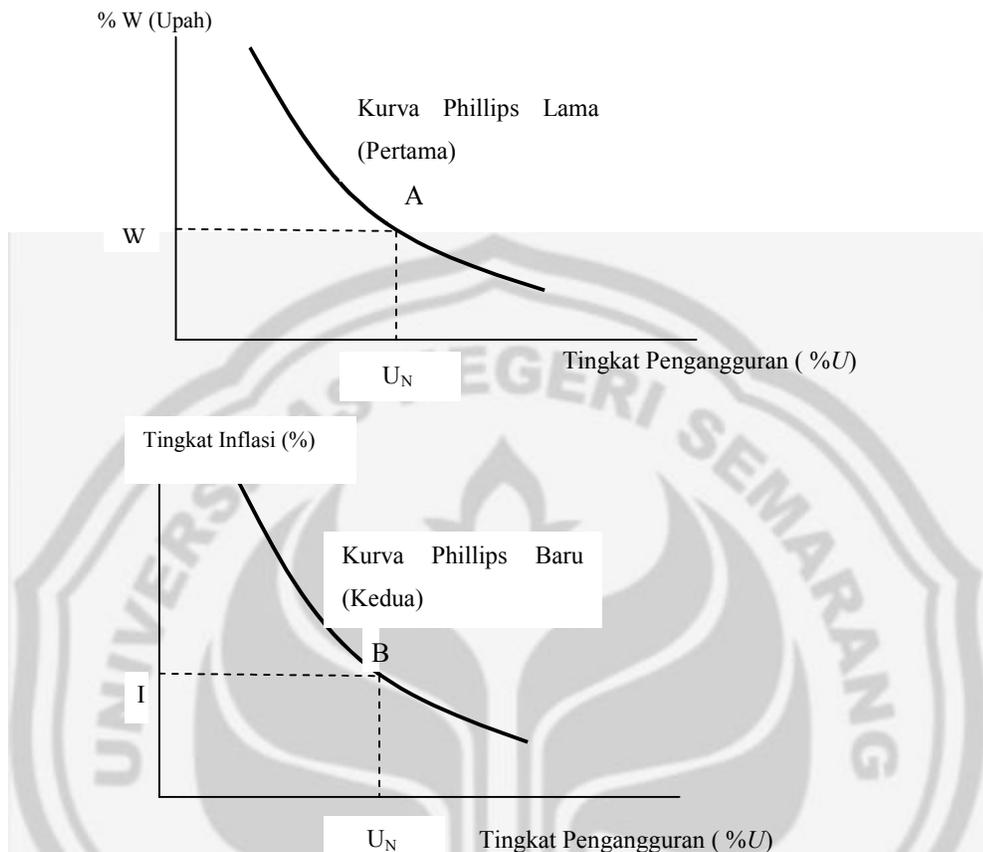
Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara inflasi dan pengangguran. Studi yang umum telah dibahas dalam kajian hubungan ini adalah teori yang dikenal dengan kurva Phillips. Teori yang mengkaji hubungan antara pengangguran dan inflasi pertama kali dilakukan oleh A. W Phillips dari *London School of Economic* pada dasar tahun 1958, dengan dasar teorinya yang sering dikenal sebagai kurva Phillips. Dengan berdasarkan data empiris, teori Phillips tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pertumbuhan upah nominal dan tingkat pengangguran. Hubungan diantara kedua peubah tersebut terlihat stabil.

Untuk tujuan membuat Kurva Phillips ini, dasar teori kurva Phillips pertama berdasarkan teori pasar tenaga kerja yang diuji berdasarkan data empiris perekonomian di Inggris dari tahun 1861-1957. Latar belakang timbulnya teori ini karena adanya keraguan terhadap masalah pokok dan implikasi kebijakan makro ekonomi pada tahun 1950-an, yang ingin mencapai secara serentak kestabilan harga serta kesempatan kerja yang tinggi (penuh). Dasar teori pertama ditemukan adanya hubungan yang negatif antara persentase tingkat upah dengan tingkat persentase pengangguran yang kemudian kurva ini lebih dikenal

dengan sebagai Kurva Phillips, sesuai dengan nama penemunya, dan selanjutnya Kurva Phillips ini dikenal sebagai Kurva Phillips Pertama.



Gambar 2.2: Hubungan Upah (W) dengan pengangguran (U) serta Kurva Phillips Baru

Sumber: *Fundamental Makro Ekonomi*, (Prasetyo, Eko 2009: 231).

Pada gambar Kurva Phillips pertama, tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*) ini digambarkan sebagai perpotongan antara Kurva Phillips dengan sumbu horisontal. Dimana, *natural rate of unemployment* (U_N) merupakan tingkat pengangguran dalam mana terdapat kestabilan upah ($W=0$). Dasar teori ini yang kemudian dikembangkan oleh para ahli ekonomi berikutnya. Misal, analisis Lipsey mengenai Kurva Phillips dengan

menggambarkan teori pasar tenaga kerja mulai dengan dua pertanyaan: pertama, penawaran dan permintaan akan tenaga kerja menentukan tingkat upah, kedua laju perubahan tingkat upah ditentukan oleh kelebihan permintaan akan tenaga kerja. Jika semakin besar kelebihan permintaan akan tenaga kerja maka tingkat perubahan upah juga semakin besar. Sedangkan kelebihan permintaan mempunyai hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Selanjutnya, makin besar kelebihan permintaan akan tenaga kerja, pengangguran cenderung makin kecil. Dari hubungan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tingkat upah mempunyai hubungan terbalik (negatif) dengan tingkat pengangguran. Artinya, makin besar tingkat pengangguran, maka tingkat pengangguran upah makin kecil. Hubungan seperti inilah yang tercermin dalam kurva Phillips pertama.

Dasar teori keduanya (pembaharuan), yakni berdasarkan pendekatan harga harapan (*rational expectation*), yang kemudian variabel upah diganti dengan variabel tingkat harga dan kemudian tingkat harga diganti dengan tingkat inflasi. Pada akhirnya dasar teori kedua ini menemukan adanya hubungan yang negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat persentase pengangguran, yang selanjutnya kurva Phillips ini sering dikenal dengan kurva Phillips kedua (lihat gambar 2). Ketika terjadi depresi di Amerika Serikat tahun 1929, terjadi inflasi yang lebih tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang lebih tinggi pula. Berdasarkan data tersebutlah A.W. Phillips mengamati hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Dari hasil pengamatannya tersebut, ternyata ada kaitan erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran, dalam arti jika inflasi tinggi maka tingkat pengangguran akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva

Phillips hingga sekarang. Selanjutnya, kurva Phillips tidak lagi dibedakan kurva Phillips pertama atau kedua, namun lebih dibedakan kurva Phillips jangka pendek maupun kurva Phillips jangka panjang (Prasetyo, Eko 2009:233).

2.2.2 Pengaruh Tingkat PDRB Terhadap Pengangguran

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah atau regional merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antara wilayah di dalam region maupun antar region dan mengembangkan ekonomi secara sektoral maupun antar atau lintas sektoral yang lebih menguntungkan dikaitkan atau didukung dengan strategi peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Untuk mengetahui atau menilai seberapa jauh keberhasilan perkembangan ekonomi suatu daerah, diperlukan berbagai macam data statistik. Salah satu data statistik yang dapat disajikan sebagai bahan analisis tentang pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau region adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi disuatu wilayah (BPS 2000:1-2). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada tiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

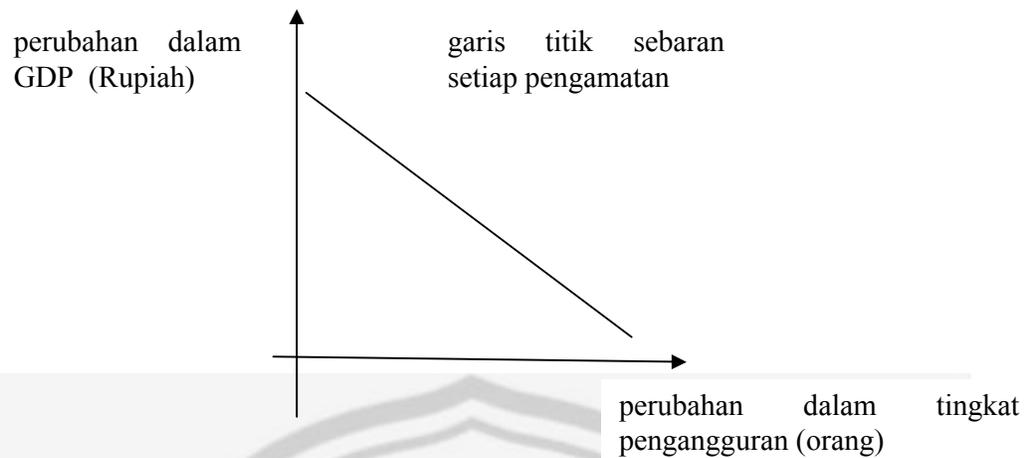
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini tahun dasar 2000. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat penyesuaian dan struktur ekonomi sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada empat pendekatan yang digunakan yaitu menurut pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran dan metode alokasi. Menghitung angka PDRB dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan produksi dimana PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu regional atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi sembilan sektor (9) usaha. Kesembilan sektor tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pertanian.
- b) Pertambangan dan penggalian.
- c) Industri pengolahan.
- d) Listrik, gas dan air.
- e) Bangunan.
- f) Perdagangan, hotel dan restoran.
- g) Pengangkutan dan komunikasi.
- h) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
- i) Jasa-jasa.

Cara penyampaian PDRB ada dua (2) yaitu PDRB berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan. Dimana PDRB harga konstan dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau tiap sektor ekonomi dari tahun ketahun dan mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan antar pulau atau antar provinsi. Dalam perkembangannya PDRB dalam perekonomian negara mempunyai konsep yaitu bahwa dalam perekonomian setiap negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambahan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hubungan antara tingkat PDRB yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran diungkapkan oleh George Mankiw. Hal ini didasarkan pada Hukum Okun, yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan besarnya PDRB suatu daerah.



Gambar 2.3: Kurva hubungan GDP dengan pengangguran (U) serta Hukum Okun.

Sumber: Teori Makro Ekonomi, (Mankiw, 2000: 432)

Seorang ahli ekonomi Okun memperkenalkan Hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP riil, dimana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP. Pada kurva Okun terdapat garis sumbu horizontal yang menunjukkan perubahan tingkat pengangguran dan persentase GDP riil pada sumbu vertikal. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat hubungannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun. Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pengangguran dalam suatu daerah maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya PDRB sebesar 2 persen. Apabila PDRB suatu daerah turun maka produksinya juga turun, artinya tingkat produksi yang ada di daerah tersebut turun diakibatkan oleh konsumsi yang turun dari masyarakat dan juga tenaga kerja yang digunakan juga akan turun, akibat dari berkurangnya produksi perusahaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

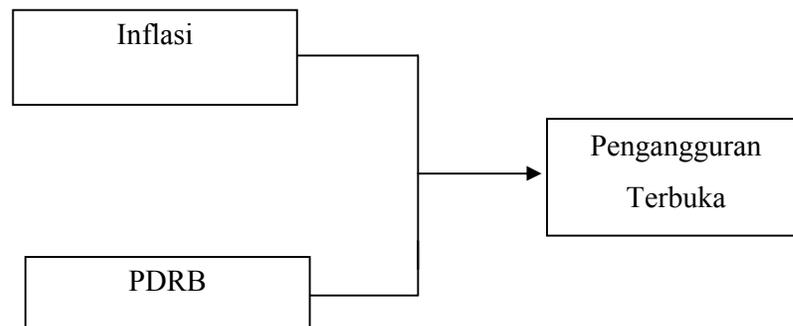
1. Menurut Daryono Soebagio dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat beban tanggungan penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi datu 1 Jawa Tengah ”. Di peroleh kesimpulan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak memiliki sigifikansi terhadap tingkat pengangguran yang terjadi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sedangkan tingkat beban tanggungan penduduk atau kesempatan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingginya tingkat pengangguran di Provinsi datu 1 Jawa Tengah. Kaitan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah bahwa tingkat pendidikan dasar tidak memiliki hasil yang signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah, kemudian Peneliti mempunyai ide untuk mengambil data antara tahun 1993-2009 atau dengan kata lain jangka panjang apakah hasil tingkat pendidikan yang di dapat akan sama dengan hasil yang didapat jurnal diatas atau sebaliknya dengan tempat yang sama yaitu di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menurut Fitra Kincaka Riska (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan Pengangguran sebagai variabel dependen dan Upah, Beban Tanggungan Penduduk, Tingkat Inflasi, dan GDP sebagai variabel independen. Diperoleh kesimpulan variabel upah berpengaruh secara negatif dan signifikan, variabel beban tanggungan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, variabel inflasi berpengaruh

positif dan tidak signifikan serta pertumbuhan GDP berpengaruh negatif dan signifikan. Kaitan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah terdapat variabel inflasi dan pengangguran, namun upah skripsi pada Fitra Kincaka Riska mengambil tempat di Indonesia. Sedang skripsi peneliti mengambil tempat di Jawa Tengah.

3. Menurut Moch. Rum Alim (2007) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor penentu pengangguran terbuka di Indonesia periode 1980-2007. Penelitian ini menggunakan pengangguran sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengeluaran pemerintah sebagai independen. Diperoleh hasil variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka dan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan di muka, mainfka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.4

Kerangka Berpikir Penelitian

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi dan PDRB akan membawa dampak terhadap besarnya tingkat pengangguran. Perubahan yang terjadi baik pada inflasi dan PDRB akan mengakibatkan perubahan yang terjadi pada tingkat pengangguran di Jawa Tengah.

Tingkat PDRB akan berpengaruh pada besarnya tingkat pengangguran yang terjadi. Setiap peningkatan terhadap persentase pengangguran dalam suatu wilayah maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya PDRB sebesar 2 persen. Pengukuran besaran PDRB yang digunakan adalah dengan melihat pada besaran PDRB dengan harga konstan. Tingkat PDRB yang tinggi dalam suatu daerah akan bisa mengurangi pengangguran melalui peningkatan produksi dalam suatu perusahaan dengan menyerap tenaga kerja lebih banyak agar bisa menghasilkan barang dan jasa lebih banyak. Dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak maka tingkat pengangguran dapat dikurangi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh semakin tinggi tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan karena banyak para pencari kerja ingin

mendapatkan pekerjaan yang terbaik namun kesempatan kerja yang ada tidak memadai.

Inflasi yang terjadi pada suatu Negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi tingkat inflasi maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah pengangguran pada negara tersebut. Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksinya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2006 : 71). Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dinyatakan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh negatif antara inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah
2. Ada pengaruh negatif antara PDRB terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah
3. Ada pengaruh Inflasi dan PDRB secara bersama-sama terhadap pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif deskriptif karena penelitian ini lebih berdasarkan data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh. Dimana hasil data tersebut akan diuraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu sehingga mencapai suatu kesimpulan yang dibutuhkan.

3.2 Jenis dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan teori-teori dari buku-buku bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut dikeluarkan oleh BPS (Jawa Tengah Dalam Angka). Data yang digunakan bersifat tahunan dan meliputi kurun waktu 1993-2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengangguran, inflasi dan PDRB tahun 1993-2009 di Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Definisi Operasional

a. Inflasi

Inflasi dalam penelitian ini merupakan proses kenaikan harga-harga umum sejumlah barang-barang dan jasa-jasa secara terus menerus selama satu periode tertentu. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen per kabupaten/kota tahun 1993-2009 dengan satuan persen.

b. PDRB

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan semua nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dari suatu wilayah dalam jangka waktu 1 tahun. Data PDRB yang dipakai dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan. Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1993-2009 dengan satuan milyar rupiah.

c. Pengangguran

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Data Pengangguran yang dipakai dalam penelitian ini adalah data pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009 dengan satuan juta jiwa.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, Hal ini dilakukan dengan

membaca dan mempelajari buku-buku ekonomi, masalah-masalah, dan bahan-bahan kuliah yang relevan dengan materi yang penulis susun.

3.5 Metode Analisis Data

Alat analisis yang penulis gunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 17. Sedangkan analisis dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah metode analisis dengan cara mendeskripsikan penulisan variabel-variabel yang berhubungan dengan permasalahan. Maksud dengan mendeskripsikan variabel-variabel ini adalah sebagai pendukung hasil dari analisis kuantitatif.

3.5.2 Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah metode analisis data dari hal-hal yang berhubungan dengan angka dan menggunakan rumus-rumus serta teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang sedang diteliti.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Jawa Tengah tahun 1993-2009 menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata inflasi dan PDRB mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya bentuk fungsi tersebut dapat diformulasikan secara sederhana sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

Dimana

Y : Pengangguran terbuka

X₁ : Inflasi

X₂ : PDRB

β_1 : Koefisien regresi Inflasi

β_2 : Koefisien regresi PDRB

α : bilangan konstanta

μ : variabel pengganggu

3.5.3 Pengujian Hipotesis

3.5.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 17 dengan melihat probabilitas t-statistiknya. Bila probabilitas t-statistik < α (0.05) artinya ada pengaruh inflasi dan PDRB secara parsial terhadap pengangguran di Jawa Tengah.

Bila probabilitas t-statistik > α (0.05) artinya tidak ada pengaruh inflasi dan PDRB secara parsial terhadap pengangguran di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini uji t dengan menggunakan 1 sisi.

3.5.3.2 Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji statistik F)

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji F, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila dari perhitungan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi dapat menerangkan bahwa variabel terikat secara bersama-sama, sebaliknya jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka H_a ditolak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi linier berganda tidak mampu menjelaskan variabel terikat.

3.5.3.3 Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali 2001:45).

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

3.5.4.1 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). Sedangkan dasar dari pengambilan keputusan dengan melihat grafik scatterplot pada tabel SPSS dengan program komputasi *SPSS for Windows release 17*, dengan dasar analisis jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2001:69).

Analisis dengan grafik *plots* memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil *ploting*. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit mempresentasikan hasil grafik *plot*. Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji gletser. Uji Gletser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2001), jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001:69). Bila nilai probabilitas signifikansi variabel independent $> \alpha = 0.05$ maka model yang digunakan tidak terkena heteroskedastisitas. Untuk menguji hipotesis ini digunakan perhitungan dengan program komputasi *SPSS for Windows release 17.0*.

3.5.4.2 Uji Multikolinieritas

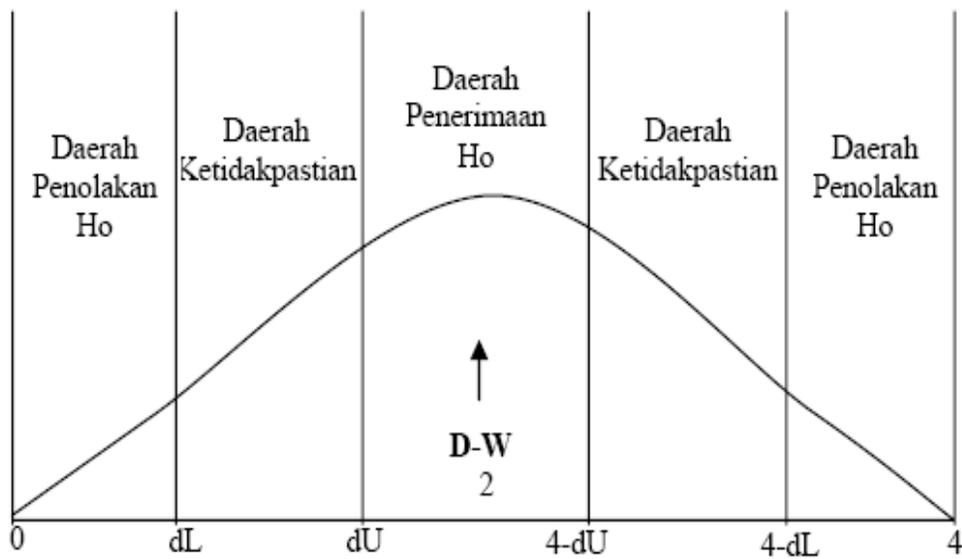
Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan hubungan linier di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Bila variabel-variabel bebas berkorelasi secara sempurna, maka metode kuadrat terkecil tidak bisa digunakan. Uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation faktor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan kolinieritas yang tinggi. Lebih ditegaskan oleh Ghazali (2001:59) bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 90% maka VIF-nya di atas 10 maka dapat dikatakan bahwa model tersebut multikolinieritas.

3.5.4.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau *time series data*) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau *cross-sectional data*).

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan cara membandingkan penghitungan nilai Durbin Watson (DW) hasil output SPSS dengan tabel Durbin Watson (*Durbin Watson Test Bound*). Disamping itu bisa dideteksi dengan membandingkan antara DW statistik dengan DW Tabel.

Kepuasan untuk menolak adanya autokorelasi apabila $d_u < d < 4 - d_u$. Lihat gambar berikut :



Gambar 3.1 Peraga Uji Durbin Watson



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya cukup strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa yang diapit oleh provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang bagian utara dan selatan terbentang pantai yang cukup panjang. Letaknya antara 5°40' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi Jawa Tengah memiliki luas total mencapai 3.254.412 hektar atau sekitar 25,04% dari total Pulau Jawa dan sekitar 1,7% dari luas wilayah Indonesia.

Secara administratif, provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 4 Kota administratif, yaitu Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi. Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian wilayah kabupaten.

Batas Provinsi Jawa Tengah meliputi:

U : Laut Jawa

T : Provinsi Jawa Timur

S : Provinsi D.I Yogyakarta dan Samudra Indonesia

B : Provinsi Jawa Barat

Secara geografis Propinsi Jawa Tengah memiliki daerah yang bervariasi, mulai dari dataran rendah sampai pegunungan dengan dataran tingginya. Secara umum memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 24° - 31° . Wilayah yang memiliki ketinggian antara 0–100m dari permukaan laut yang memanjang di sepanjang pantai utara dan selatan seluas 53,3%, Ketinggian 100 – 500m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau seluas 27,4%, Ketinggian 500 – 1.000 m dari permukaan laut seluas 14,7%, dan ketinggian di atas 1.000 m dari permukaan laut seluas 4,6%. Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah antara $24,4^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $28,5^{\circ}\text{C}$. Kesuburan tanah yang ada disebabkan keberadaan beberapa gunung api yang masih aktif sehingga menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu penghasil padi yang besar, disamping itu juga komoditi lain seperti tembakau dan sayur-sayuran. Lahan pertanian yang berupa tanah sawah memiliki luas 996 ribu hektar atau sebesar 30,60% dan lahan pertanian bukan sawah seluas 2,26 juta hektar atau 69,32%.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah cukup besar dan beragam jenisnya. Potensi air permukaan terdapat pada satuan wilayah sungai yang meliputi : Bengawan Solo, Serayu, Citunday, Comal, Pemali dan Jratunseluna dengan potensi sebesar $94.752,82 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan potensi air bawah tanah sebesar $532,172 \text{ juta m}^3$.

4.2 Kondisi Pengangguran terbuka Terbuka di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.1
Jumlah Inflasi, PDRB dan Pengangguran terbuka Terbuka di
Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009

Tahun	Inflasi (%)	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pengangguran terbuka Terbuka (Juta Jiwa)
1993	9.77	90 913 535	493 330
1994	9.24	95 450 452	585 392
1995	8.64	98 307 200	580 548
1996	6.47	103 650 400	552 914
1997	11.05	107 250 952	599 237
1998	77.63	105 670 350	831 435
1999	2.01	109 723 231	867 226
2000	9.35	114 701 305	637 900
2001	12.55	118 816 400	578 190
2002	10.03	123 038 541	984 234
2003	5.06	129 166 462	912 513
2004	6.4	135 789 872	1 044 573
2005	17.11	143 051 214	998 765
2006	6.6	150 682 655	1 197 244
2007	6.59	159 110 254	1 360 219
2008	9.47	167 790 370	1 227 308
2009	3.62	175 685 268	1 252 267

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS.

Dari tabel diatas terlihat bahwa kenaikan PDRB di Provinsi Jawa Tengah ternyata di barengi juga dengan peningkatan pengangguran terbuka terbuka, angka pengangguran terbuka terbuka sempat turun antara tahun 2000-2001 namun pada tahun 2002 naik lagi sampai tahun 2009. Meskipun angka pengangguran terbuka tidak naik secara drastis tetapi ada kecenderungan naik yaitu dapat dilihat pada tahun 2002-2007 dengan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2007 sebesar 7.70 %. Variabel inflasi juga mengalami kenaikan pada tahun 1998, itu di sebabkan adanya imbas dari krisis ekonomi pada tahun 1997. Pada tahun 1998

angka pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan yaitu pada tahun 1997 berjumlah 599 237 juta jiwa menjadi 831 435 juta jiwa di tahun 1998.

4.3 Gambaran Variabel Penelitian

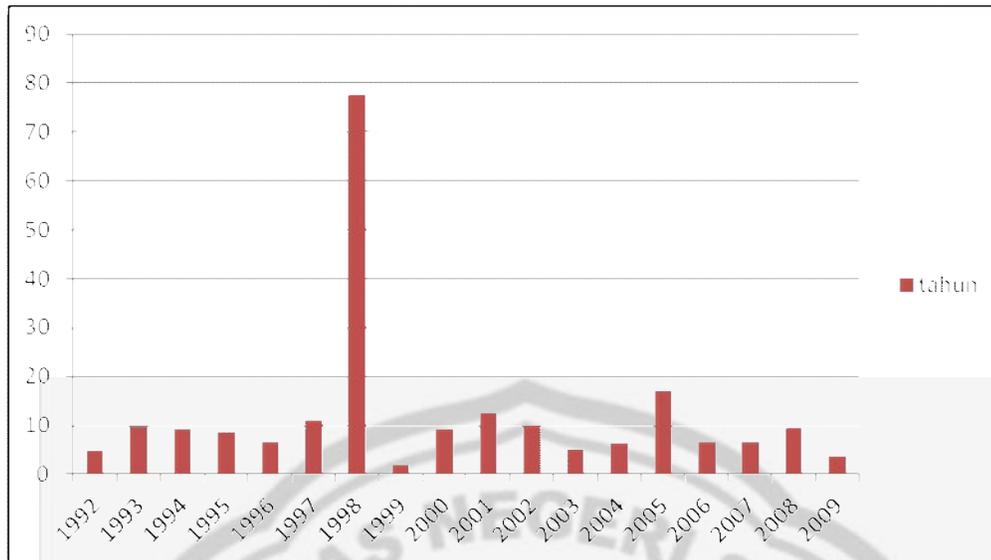
4.3.1 Inflasi (X_1)

Data tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat inflasi di Jawa Tengah dari tahun 1993-2008 (dalam persen per tahun).

Tabel 4.2
Tingkat Inflasi di Jawa Tengah Tahun 1993-2009
(dalam persen per tahun)

Tahun	Inflasi
1993	9.77
1994	9.24
1995	8.64
1996	6.47
1997	11.05
1998	77.63
1999	2.01
2000	9.35
2001	12.55
2002	10.03
2003	5.06
2004	6.4
2005	17.11
2006	6.6
2007	6.59
2008	9.47
2009	3.62

Sumber: BPS, dalam Angka 2009



Grafik 4.1. Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009 (dalam persen)

Sumber: BPS dalam angka, diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa laju inflasi di Jawa Tengah periode 1989-2007 masih sangat fluktuatif. Pada tahun 1998 tingkat inflasi melambung naik sangat tinggi hingga mencapai 70.56%. Hal ini disebabkan dari dampak krisis ekonomi tahun 1997, daerah-daerah pun mengalami krisis. Inflasi yang tinggi terutama adalah terjadinya masa paceklik bahan pangan akibat musim kemarau yang berkepanjangan yang disertai oleh peningkatan harga barang ekspor non minyak pada tahun 1998.

Dalam rangka mengatasi laju inflasi yang demikian tinggi, pemerintah mengeluarkan kebijakan anti inflasi dalam bentuk Paket Anti Inflasi yang menyangkut segi permintaan dan penawaran. Di bidang pengelolaan permintaan dilakukan berbagai kebijakan perkreditan dalam negeri, kebijakan dana, kebijakan penanaman modal dan kebijakan anggaran belanja. Sedangkan dari sisi penawaran, dilakukan program cadangan nasional, kebijakan perdagangan dalam negeri dan program pengadaan pangan. Akibat adanya paket kebijakan tersebut laju inflasi di

Indonesia turun cukup pesat pada beberapa tahun berikutnya. Dengan adanya kebijakan anti inflasi dalam bentuk Paket Anti Inflasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdampak juga di Jawa Tengah. Laju inflasi di Jawa Tengah mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 2.01% pada tahun 1999.

4.3.2 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (X_2)

Data PDRB yang di pakai dalam penelitian ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1993-2009. Menurut BPS (2008), Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender).

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional cukup besar namun terkadang tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, peran tersebut menjadi beban optimal. Fenomena perekonomian saat ini cenderung menuntut adanya peran aktif dari para eksekutif untuk lebih banyak menggali potensi perekonomian daerahnya serta memainkan peranan yang lebih besar dalam merangsang aktivitas ekonomi daerah.

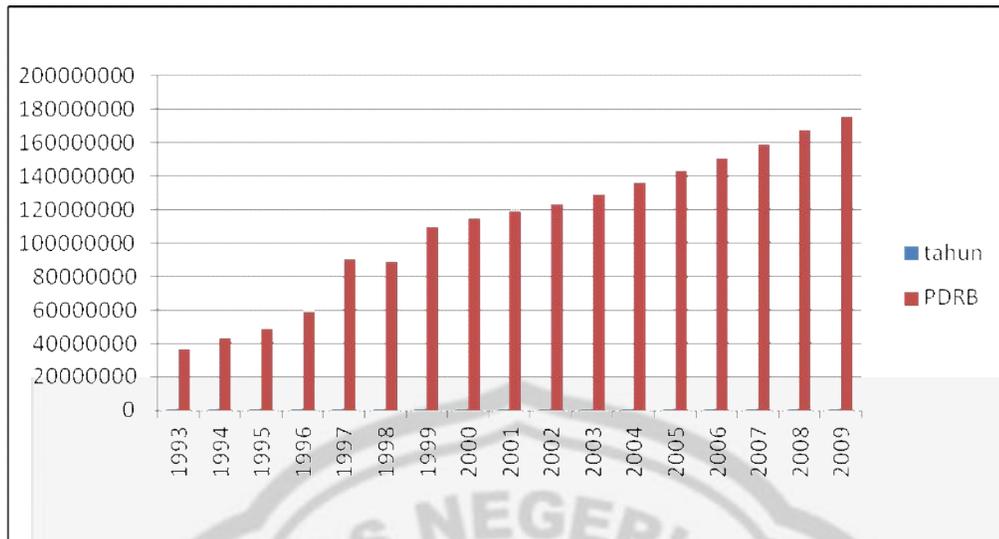
Pembangunan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka mendukung pembangunan daerah

Provinsi Jawa Tengah serta bertujuan mengembangkan potensi perekonomian daerah secara optimal. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan kondisi perekonomian wilayah tersebut. Salah satu indikator ekonomi dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat menggunakan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan adalah angka PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan.

Tabel 4.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Provinsi Jawa Tengah Tahun
1993-2009 (dalam Jutaan Rupiah per Tahun)

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB
1993	90 913535	10.8
1994	95 450 452	7.0
1995	98 307 200	7.4
1996	103650400	7.3
1997	107250952	3.0
1998	105670350	-12.4
1999	109723231	4.2
2000	114 701 305	191.4
2001	118 816 400	3.6
2002	123 038 541	3.6
2003	129 166 462	5.0
2004	135 789 872	5.1
2005	143 051 214	5.3
2006	150 682 655	5.3
2009	159 110 254	5.6
2008	167 790 370	5.5
2009	175 685 268	4.7

Sumber: BPS dalam angka, Jawa Tengah



Grafik 4.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009 (dalam jutaan Rupiah)

Sumber : BPS Jawa Tengah dalam angka 2009

Dari Grafik diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup stabil hanya saja di tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan, itu di karenakan adanya krisis ekonomi di tahun 1997.

4.4 Analisis Data Penelitian

4.4.1 Hasil Analisis Regresi

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan alat Regresi Linier Berganda dengan metode kuadrat terkecil (OLS) dengan menggunakan SPSS 17, diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Analisa Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1 (Constant)	1010433.617	102159.856		.000		
Inflasi	-2348.406	3901.965	-.141	.557	.988	1.013
PDRB	-.004	.002	-.481	.040	.988	1.013

a. Dependent Variable: Pengangguran terbuka terbuka

Hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.5 di atas diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka terbuka di Provinsi Jawa Tengah adalah PDRB karena nilainya signifikan = α (0.05) yaitu $0.04 < 0.05$ sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan sehingga diperoleh persamaan regresi $Y = 1010433.617 - 2348.406 X_1 - 0.004 X_2 + e$

4.4.2 Pengujian Hipotesis

4.4.2.1 Uji t

Uji t atau uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh inflasi dan PDRB terhadap pengangguran terbuka terbuka di Provinsi Jawa Tengah secara sendiri-sendiri. Dengan memanfaatkan tabel 4.5 di atas, maka pengujian hipotesis dengan uji t dapat di jelaskan sebagai berikut :

- **Inflasi (X_1)**

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diperoleh nilai probabilitas untuk variabel Inflasi sebesar 0.557 oleh karena nilai probabilitasnya $> \alpha$ 0.05 maka dapat dikatakan bahwa variabel inflasi tidak signifikan. Dilihat dari nilai *coefficientnya* sebesar - 2348.406 maka dapat dikatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh

negatif terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah periode 1993-2009.

- **PDRB (X_2)**

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diperoleh nilai probabilitas untuk variabel PDRB sebesar 0.04 oleh karena nilai probabilitas $< \alpha$ 0.05 maka dapat dikatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh secara signifikan. Dilihat dari nilai *coefficientnya* sebesar -0.04 dapat dikatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah periode 1993-2009.

4.4.2.2 Uji F

Tabel 4.6
Uji Bersama-sama
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.071E11	2	1.536E11	2.168	.041 ^a
	Residual	9.916E11	14	7.083E10		
	Total	1.299E12	16			

a. Predictors: (Constant), PDRB, Inflasi

b. Dependent Variable: Pengangguran terbuka

Berdasarkan penghitungan SPSS 17 diatas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0.04 dengan signifikansi 5 %. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa inflasi (X_1) dan PDRB (X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah (Y).

4.4.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel inflasi dan PDRB terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. secara bersama-sama dapat di ketahui dari nilai R^2 . Berikut disajikan dalam tabel yang berisi R square dalam tabel model summary berikut:

Tabel 4.7
Model Summary
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.486 ^a	.236	.127	2.66143E5	1.447

a. Predictors: (Constant), PDRB, Inflasi

b. Dependent Variable: Pengangguran terbuka

Setelah melakukan penghitungan dengan menggunakan program SPSS17 *for windows* di ketahui besar nilai R^2 adalah 0.236. Hal ini berarti 23.6% variasi pengangguran terbuka dijelaskan oleh variabel independent rata-rata inflasi dan PDRB, sedangkan sisanya ($100\% - 76.4\% = 23.6\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model, sedangkan *Standard Error Of Estimate* (SEE) sebesar 0.12783

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

4.4.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linier yang pasti diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Untuk Mengetahui ada tidaknya Multikolinieritas dapat pula dilihat pada nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*), yaitu:

- Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat Multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

Adapun hasil pengujian multikolinieritas untuk variabel-variabel penelitian pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1	(Constant)	1010433.617	102159.856			
	Inflasi	-2348.406	3901.965	-.141	.557	.988
	PDRB	-.004	.002	-.481	.040	.988

a. Dependent Variable: Pengangguran terbuka

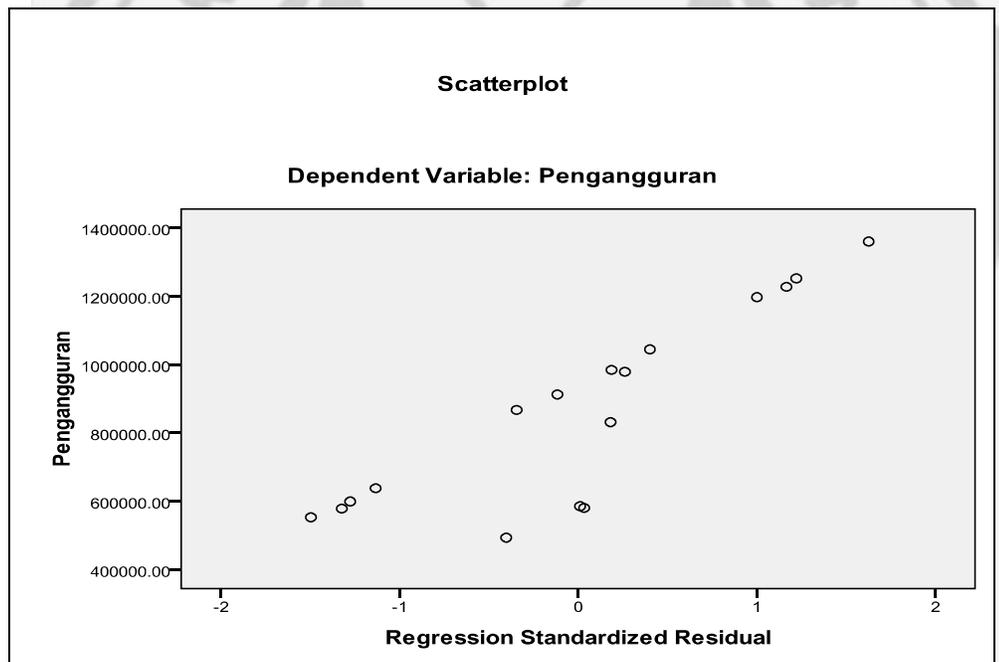
Dari tabel diatas dapat diketahui model regresi bebas dari mutikolinieritas karena nilai tolerance semua variabel > 0.10. Nilai tolerance variabel inflasi sebesar 0.988 dan variabel PDRB sebesar 0.988. Nilai VIF variabel independen < 10, yaitu variabel inflasi sebesar 1.013 dan variabel PDRB sebesar 1.013. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi adanya multikolinieritas dalam regresinya.

4.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

a. Uji Heteroskedastisitas menggunakan grafik Scatterplot

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas untuk variabel-variabel penelitian pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplots terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas, ditengah maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model

regresi layak digunakan untuk memprediksi pengangguran terbuka di Jawa Tengah berdasarkan masukan variabel inflasi dan PDRB.

b. Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glester

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini selain menggunakan grafik *scatterplot* juga menggunakan uji gletser pada software SPSS *release for windows 17* untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas yang lebih akurat. Uji gletser ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Uji Gletser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.042	1.282		.033	.974
	Inflasi	.021	.026	.353	.799	.438
	PDRB	-.008	.083	-.041	-.092	.928

a. Dependent Variable: residual

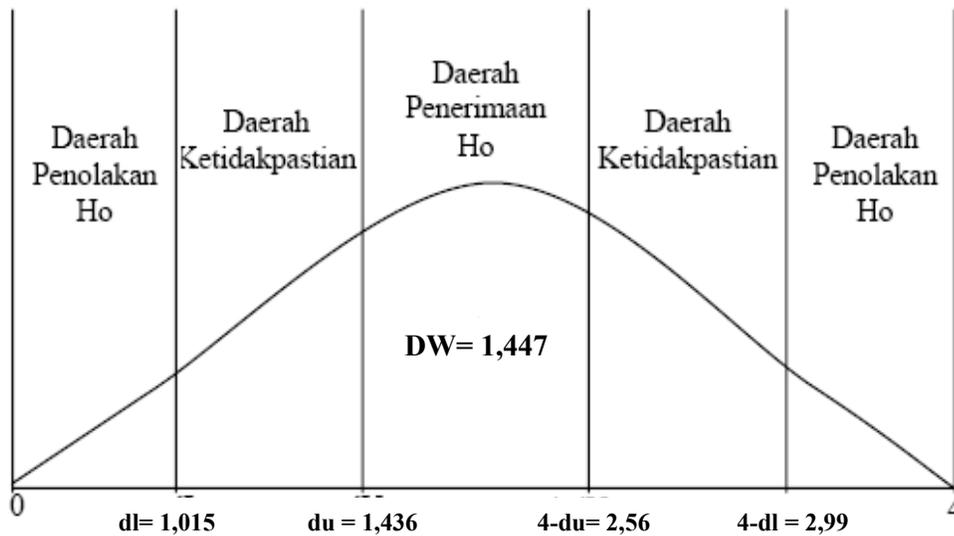
Berdasarkan uji gletser pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat diketahui dari masing-masing nilai probabilitas variabel independen diatas $\alpha = 0.05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4.3.3 Uji Autokorelasi

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan cara membandingkan penghitungan nilai Durbin Watson (DW) hasil output SPSS dengan tabel Durbin Watson (*Durbin Watson Test Bound*). Disamping itu bisa

dideteksi dengan membandingkan antara DW statistik dengan DW Tabel.

Kepuasan untuk menolak adanya autokorelasi apabila $d_u < d < 4 - d_u$.



Gambar 4.2 : Hasil Uji Durbin Watson
Sumber: Data Primer, diolah

Nilai d_l dan d_u dengan jumlah variabel bebas 2 dan N sebesar 17 adalah masing-masing 1,015 dan 1,436 maka keputusan untuk mengatakan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi apabila $d_u < d < 4 - d_u$ ($1,436 < 1,44 < 2,56$) bisa diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak adanya autokorelasi didalam model.

4.5 Pembahasan

Dari hasil statistik dan ekonometrik yang telah dilakukan diatas yaitu dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan mampu menerangkan perubahan-perubahan Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Dari seluruh variabel utama yang dimasukkan kedalam model, ternyata

semua variabel bebas signifikan. Hal ini berarti bahwa Pengangguran terbuka di Jawa Tengah dipengaruhi oleh variabel bebas yang diuji.

Interpretasi dari uji signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.5.1 Inflasi

Diperoleh hasil bahwa inflasi (X_1) tidak signifikan pada taraf 5% dan berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009, yang ditunjukkan dari nilai *coefficient* sebesar -2348.4. *Coefficient* inflasi yang memiliki arah negatif menunjukkan bahwa apabila inflasi semakin meningkat, maka akan menurunkan pengangguran terbuka sebesar 0.2348%. Hasil penelitian ini sesuai dengan landasan teori penelitian yang berpengaruh negatif dan sesuai dengan teori mengenai kurva Phillips dimana bila inflasi naik maka akan menurunkan pengangguran terbuka. Hal ini senada dengan penelitian milik Much. Roem Alim (2007) dimana terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan pengangguran terbuka.

Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara laju inflasi dengan pengangguran terbuka tidak signifikan dengan koefisien arah regresi yang diperoleh sesuai dengan hipotesis dan teori-teori yang telah dikemukakan. Hasil penelitian milik Amir Amri juga menjelaskan ketidaksignifikannya antara inflasi dan pengangguran terbuka didasarkan pada hasil analisis tingkat pengangguran terbuka dan inflasi di Indonesia dari tahun 1980-2005 ternyata secara statistik maupun grafis tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan tingkat pengangguran terbuka. Masalah ini terjadi karena disebabkan oleh

pertambahan angkatan kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Selain itu, inflasi di Indonesia termasuk inflasi yang terjadi karena *Cost Push Inflation* yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. Sebagai contoh, naiknya harga minyak dunia dan kenaikan upah/gaji misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang.

4.5.2 PDRB (X_3)

Diperoleh hasil bahwa pertumbuhan PDRB (X_2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993-2009, yang ditunjukkan dengan nilai *coefficient* -0.04. *Coefficient* PDRB yang memiliki arah negatif menunjukkan bahwa apabila PDRB semakin meningkat, maka akan menurunkan pengangguran terbuka sebesar 0.04%. Hasil penelitian ini sesuai dengan landasan teori skripsi peneliti dimana terdapat hubungan yang negatif. Hal ini berarti bahwa peningkatan PDRB di Jawa Tengah diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Fitra Kincaka Riska (2006), namun tidak sesuai dalam penelitian milik Moch. Rum Alim, yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDRB di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.

Ini berarti dengan peningkatan terhadap pertumbuhan PDRB diikuti dengan penurunan pengangguran terbuka. Teori mengenai hubungan PDRB dan

pengangguran terbuka diungkapkan dalam hukum Okun. Ini sesuai dengan teori hukum Okun tersebut yang menyebutkan bahwa jika terjadi peningkatan terhadap tingkat pengangguran terbuka di suatu Negara maka hal tersebut setara dengan terjadinya penurunan pertumbuhan PDRB sebesar 2 persen.

Kesignifikannya PDRB dalam mempengaruhi pengangguran terbuka juga dapat dilihat berdasarkan data bahwa peningkatan laju PDRB di Jawa Tengah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 diiringi dengan penurunan pengangguran terbuka di Jawa Tengah, ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di setiap desa atau kota sepenuhnya menyerap tenaga kerja yang ada sehingga jumlah penganggur akan berkurang.

Dari ke-2 variabel bebas, yang signifikan berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah adalah PDRB. Terlihat bahwa variabel bebas ini memiliki pengaruh terbesar dan sangat signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Hal ini berarti variabel PDRB memberikan pengaruh paling dominan terhadap pengangguran terbuka dibandingkan variabel bebas lainnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa ada pengaruh inflasi (X_1) terhadap pengangguran terbuka dimana inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan hasil *coefficient* sebesar -2348.4 pada sig. sebesar 0.557. Ini berarti apabila inflasi naik akan menurunkan pengangguran sebesar 0.234%.
2. Variabel PDRB (X_2) didapatkan hasil ada pengaruh variabel PDRB terhadap pengangguran terbuka dimana berpengaruh negatif dan signifikan dengan hasil *coefficient* sebesar -0.004 pada sig. sebesar 0.04. Ini berarti apabila PDRB naik 1% maka akan menurunkan pengangguran sebesar 0.04%.
3. Sedangkan besarnya pengaruh inflasi dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Jawa Tengah ditunjukkan dengan uji F sebesar 2168 dengan nilai sig. 0.04.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Dengan adanya peningkatan inflasi maka akan menurunkan pengangguran terbuka. Inflasi yang dapat dikendalikan merupakan sebuah kesuksesan dalam perekonomian, tetapi juga harus diimbangi dengan kegiatan perekonomian yang lain seperti penurunan suku bunga, sehingga nantinya akan meningkatkan investasi dan juga memacu untuk meningkatkan ekspor. Peningkatan investasi juga bisa menambah lapangan pekerjaan yang ada sehingga pengangguran dapat berkurang. Bila pemerintah mengeluarkan investasi lebih besar, maka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya menetapkan ulang kebijakan pajaknya. Dengan pajak yang tinggi, maka daya beli masyarakat menjadi lemah dan akan memperlemah kemampuan masyarakat untuk belanja.
2. PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Dengan adanya peningkatan PDRB terhadap penurunan pengangguran terbuka, diperlukan suatu usaha untuk lebih mengurangi pengangguran misalnya dengan lebih meningkatkan peran PDRB di berbagai sektor terutama sektor ekonomi yang bersifat padat karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil, diantaranya dengan mendorong kenaikan investasi melalui suasana yang kondusif dalam memberikan kemudahan prosedur kepada para investor serta meningkatkan sarana dan prasarana di wilayah Jawa Tengah salah satunya dengan melakukan perbaikan infrastruktur baik di desa maupun di Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, Martia. 2010. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Kota Semarang". Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP.
- Aisyah, dede, 2006. "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota Semarang". Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prsedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Edisi Ketiga BP STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Berbagai Edisi. Badan Pusat Statistik.
- Provinsi Jawa Tengah. Berbagai Edisi. Badan Pusat Statistik.
- Provinsi Jawa Tengah. *Produk Domestik Regional Bruto*. Badan Pusat Statistik.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Upah Minimum Regional Provinsi Jawa Tengah.
- Dumairy. 1996, *Perekonomian Indonesia*, Cetakan kelima. Jakarta: Erlangga,
- Ghozali, Imam. 2006. *Apikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika* . Jakarta : Erlangga
- Heryani, Ade. 2009. "Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu tenaga kerja terdidik dalam mencari pekerjaan". Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNNES.
- Kaufman, Bruce, E, Junie L Hotckiss. 2000. *The Economics of Labour Markets, Fifth Edition*:The Drydon Press Harcount College Publisher, USA

- Mankiw, N. Gregory. 2003, *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Eko P. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta : Beta Offset Yogyakarta.
- Prasetyo, Tri Bambang. 2004. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya upah minimum di Kabupaten Kudus”. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP
- Riska, Fitra Kincaka. 2008. “Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia”. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP
- Rum, Alim Moch (Ed). 2007. *Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 1980-2007*”.
- Soebagio, Daryono. 2007. “Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Beban tanggungan penduduk terhadap Pengangguran di Jawa Tengah”. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP.
- Siagian P. Sondang. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Simanjuntak, Payaman. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE. UI.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*”(ed.2). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tarsidin (Ed). 2007. “Pengangguran Struktural: Faktor yang Mempengaruhi dan dinamikanya”.
- Todaro P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tulus, H Tambunan. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 2000. Jakarta: Diperbanyak oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Ketenagakerjaan Tahun 2003 tentang. 2000. Jakarta: Diperbanyak oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah

Wing, Wahyu Winarno. 2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Unit Penerbit dan Percetakan. Yogyakarta.

Wijayanto, Dwi Rafi. 2010. “Analisis pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005-2008”. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP.

Zamaludin, Muhammad Azum. 2007. “Analisis Produk Domestik Regional Bruto dan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Pengaruhnya terhadap pembentukan upah minimum di Kota Semarang”. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi UNNES.

[www.google.com/artikel pengangguran](http://www.google.com/artikel%20pengangguran)

www.bappenas.go.id.

<http://Wikipedia.com>





Lampiran 1

Data Inflasi, PDRB dan Pengangguran Terbuka

Tahun	Inflasi (%)	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pengangguran (Juta Jiwa)
1993	9.77	33978909	493330
1994	9.24	36345174	585392
1995	8.64	39032115	580548
1996	6.47	41862204	552914
1997	11.05	43129840	599237
1998	77.63	37793150	831435
1999	2.01	39362408	867226
2000	9.35	114701305	637900
2001	12.55	118816400	578190
2002	10.03	123038541	984234
2003	5.06	129166462	912513
2004	6.4	135789872	1044573
2005	17.11	143051214	978952
2006	6.6	150682655	1197244
2007	6.59	159110254	1360219
2008	9.47	167790370	1227308
2009	3.62	175685268	1252267

Lampiran 2

Hasil Regresi

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	INFLASI, PDRB ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.486 ^a	.236	.127	2.66143E5	.236	2.168	.151	1.447

a. Predictors: (Constant), PDRB, Inflasi

b. Dependent Variable: Pengangguran

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.071E11	2	1.536E11	2.168	.041 ^a
	Residual	9.916E11	14	7.083E10		
	Total	1.299E12	16			

a. Predictors: (Constant), PDRB, Inflasi

b. Dependent Variable: Pengangguran

Lampiran 3

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1 (Constant)	1010433.617	102159.856		.000		
Inflasi	-2348.406	3901.965	-.141	.557	.988	1.013
PDRB	-.004	.002	-.481	.040	.988	1.013

a. Dependent Variable: Pengangguran terbuka

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Inflasi	PDRB
1	1	2.072	1.000	.08	.09	.08
	2	.673	1.755	.00	.53	.36
	3	.255	2.849	.92	.38	.56

a. Dependent Variable: Pengangguran

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	571628.6875	959001.8125	863734.2353	1.38548E5	17
Residual	-3.98199E5	4.32998E5	.00000	2.48954E5	17
Std. Predicted Value	-2.108	.688	.000	1.000	17
Std. Residual	-1.496	1.627	.000	.935	17

a. Dependent Variable: Pengangguran

Lampiran 4

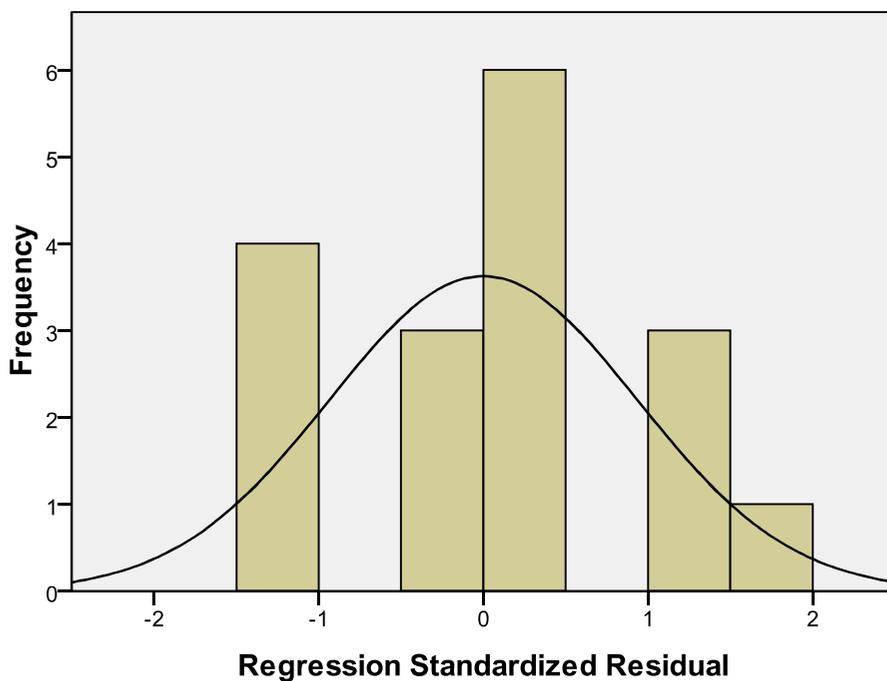
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13.1209	14.1672	13.6165	.31429	17
Residual	-.31051	.19049	.00000	.11958	17
Std. Predicted Value	-1.577	1.752	.000	1.000	17
Std. Residual	-2.429	1.490	.000	.935	17

a. Dependent Variable: LnPengangguran

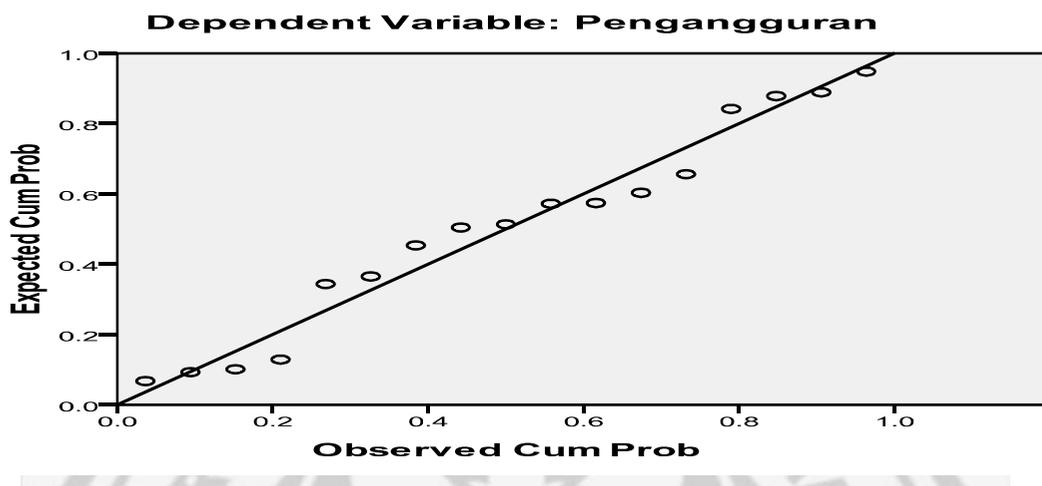
Histogram

Dependent Variable: Pengangguran



Lampiran 5

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

